

Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat di Bawah Kepemimpinan Hassan Rouhani

Ahmad Zainal Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
m.ahmadzainal@gmail.com

Abstraksi

Artikel ini menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Hassan Rouhani. Terpilihnya Rouhani sebagai Presiden Iran pada tahun 2013 memberikan lanskap baru dalam konstelasi politik Iran. Sebelum era Rouhani, Iran merupakan negara yang tidak memiliki hubungan baik dengan AS, khususnya terkait kebijakan nuklir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini ialah teori analisis kebijakan luar negeri. Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan luar negeri Hassan Rouhani terhadap Amerika Serikat? Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Iran pada masa Rouhani berfokus pada penyelamatan ekonomi dan nuklir. Kebijakan ekonomi diambil untuk menyelamatkan Iran dari sanksi ekonomi AS. Kemudian kebijakan nuklir dilakukan untuk sekuritisasi. Kebijakan nuklir yang paling fenomenal ialah kesepakatan nuklir yang terjadi pada tahun 2015 atau disebut dengan Joint Comprehensive Plan of Act (JCPOA). Kehadiran JCPOA ini memberikan sesuatu yang baru dalam konstelasi kebijakan politik Iran. Hal ini dikarenakan JCPOA telah disepakati oleh negara P5+1 yang memegang peranan penting dalam perkembangan nuklir dunia. Selain itu, sanksi yang diberikan oleh AS terhadap Iran juga resmi dicabut. Dengan demikian, Iran berhasil terlepas dari tekanan ekonomi dan menjalin kesepakatan nuklir bersama dengan AS dan beberapa negara lainnya.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Luar Negeri, JCPOA, Ekonomi, Nuklir

Abstract

This article describes Iran's foreign policy towards the United States during the leadership of Hassan Rouhani. The election of Rouhani as President of Iran in 2013 provided a new landscape in the Iranian political constellation. Before the Rouhani era, Iran was a country that did not have good relations with the US, especially regarding nuclear policy. The method used in this research is descriptive analytical. Then the data collection technique used is the documentation technique. The theory used to analyze this research is the theory of foreign policy analysis. This theory is used to answer the question how is Hassan Rouhani's foreign policy towards the United States? After doing research, it can be concluded that Iran's policy during Rouhani's time focused on saving the economy and nuclear. Economic policies were taken to save Iran from US economic sanctions. Then nuclear policy was carried out for securitization. The most phenomenal nuclear policy is the nuclear deal that took place in 2015 or is called the Joint Comprehensive Plan of Act (JCPOA). The presence of the JCPOA provides something new in the constellation of Iranian political policies. This is because the JCPOA has been agreed upon by the P5+1 countries which play an important role in the world's nuclear development. In addition, the sanctions imposed by the US on Iran were also officially lifted. Thus, Iran managed to escape the economic pressures and forge a joint nuclear deal with the US and several other countries.

Keywords: Foreign Policy Analysis, JCPOA, Economics, Nuclear

Pendahuluan

Konflik Iran dengan Amerika Serikat terjadi karena ada kecurigaan bahwa Iran memperkaya uranium untuk tujuan membangun senjata nuklir. Penyebab kecurigaan AS terhadap Iran adalah fakta bahwa Iran ingin memperkaya uranium itu sendiri, meskipun uranium yang diperkaya dapat dibeli di luar negeri dengan harga murah. Iran mengklaim mereka hanya memproduksi uranium tingkat rendah yang cocok untuk reaktor dan penelitian medis. Namun, teknologi yang sama persis dapat digunakan untuk memperkaya uranium menjadi tingkat tinggi yang dibutuhkan dalam pembuatan senjata atom. Teknologi tersebut tentu memiliki daya ledak jauh lebih besar sebagaimana yang terjadi pada saat Perang Dunia II ketika AS membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang (Salehzadeh, 2013, p. 3).

Selama empat dekade terakhir, telah terjadi berbagai tren dan perkembangan dalam kebijakan luar negeri Iran. Dalam kerangka prinsip-prinsip dasar dan fundamental, berbagai pemerintahan telah menunjukkan perilaku taktis yang berbeda dalam pendekatan mereka terhadap kebijakan luar negeri. Sebaliknya, meskipun terjadi pergeseran dan perkembangan kritis di tingkat domestik, regional, dan internasional, beberapa perilaku pada dasarnya tetap tidak berubah (Golmohammadi, 2019, p. 95).

Satu setengah tahun sejak Presiden Iran Hassan Rouhani menjabat bertepatan dengan salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah Timur Tengah, yaitu *Arab Spring*. Bagi Presiden Rouhani secara pribadi, dan bagi Iran, turbulensi itu menghadirkan tantangan unik, sekaligus menawarkan peluang. Kemenangan mengejutkan Rouhani dalam pemilihan putaran pertama pada tahun 2013 meningkatkan harapan di Iran dan luar negeri bahwa ia akan mengantarkan pendekatan baru Iran untuk urusan regional dan internasional yang akan membuat negara itu tidak terlalu terisolasi. Untuk tingkat yang besar ia telah diuntungkan hanya dari fakta bahwa ia tidak memiliki kepribadian politik yang memecah belah (Shanahan, 2015, p. 5).

Presiden Iran, Hassan Rouhani, terpilih dengan janji memberikan masa depan ekonomi yang lebih baik bagi rakyat biasa Iran. Untuk merealisasikan hal tersebut, Rouhani perlu mengakhiri isolasi internasional regional Iran. Sejauh ini, dia telah diuntungkan oleh fakta bahwa dia bukan pendahulunya. Tetapi untuk membuat kemajuan nyata, dia perlu mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat dan menjangkau tetangga Teluk Iran. Namun demikian, pengalamannya sebagai orang dalam rezim, pendekatannya yang tidak terlalu konfrontatif, dan pemahamannya tentang urusan internasional berarti bahwa ia mungkin berhasil di mana upaya para pemimpin politik Iran di masa lalu untuk menormalkan hubungan Iran dengan dunia tidak berhasil (Shanahan, 2015, p. 6).

Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Rouhani dalam menyelamatkan stabilitas negara tentu ada harapan untuk memperbaiki situasi politik Iran di tingkat regional dan internasional. Untuk merealisasikannya, maka timbul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan luar negeri Hassan Rouhani terhadap Amerika Serikat? Hal ini menarik untuk dibahas karena pada periode pendahulunya, Iran dan AS seringkali terlibat ketegangan yang mengakibatkan jatuhnya sanksi terhadap Iran.

Metode

Untuk memperoleh data yang relevan dengan bahan penelitian, maka perlu adanya suatu metode untuk mengolah data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara menghimpun data yang relevan dengan pembahasan terlebih dahulu. Setelah terkumpul kemudian dilakukan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen. Adapun dokumen-dokumen tersebut bisa berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, maupun laporan penelitian yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian (Moehnilabib & dkk, 1997, p. 79). Penulis menggunakan metode ini untuk memetakan pembahasan yang bersumber dari data-data yang relevan

terkait kebijakan Iran. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan pola kebijakan Iran pada masa Hassan Rouhani. Pada era Rouhani, Iran mencoba untuk menormalisasi hubungan di bidang nuklir dan ekonomi terhadap Amerika Serikat (2013-2016).

Kerangka Pemikiran

Analisis Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy Analysis* (FPA) merupakan studi tentang manajemen hubungan eksternal suatu bangsa. FPA melibatkan pemeriksaan kebijakan eksternal suatu negara yang kemudian menjadi sebuah studi akademis yang didirikan setelah Perang Dunia II. Hal ini berkaitan dengan studi tentang dua implikasi utama, salah satunya adalah bagaimana lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri dan lainnya adalah yang lebih ideologis untuk demokratisasi politik luar negeri yaitu, mengapa dan bagaimana nilai-nilai publik dan minat harus diperkenalkan ke setiap tahap di perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut (Ahmed, 2020, p. 790).

Kebijakan luar negeri menjadi bagian penting dalam keberlangsungan hubungan luar negeri suatu negara. Perumusan kebijakan tersebut turut memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ideologi, pertahanan dan keamanan serta politik regional dan internasional suatu negara. Setelah faktor-faktor tersebut dianalisis secara seksama, maka terbentuklah kebijakan luar negeri. Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada aspek pertahanan dan keamanan serta ekonomi. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh Ahmed (2020), kebijakan politik luar negeri juga tidak terlepas dari faktor ideologi. Hal ini dikarenakan ideologi memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan. Sebelum Rouhani memimpin, Iran menganut ideologi politik yang keras dan anti Barat. Namun setelah Rouhani terpilih sebagai presiden, Iran mulai membuka ruang politik yang relatif lebih tenang dan membuka babak baru hubungan dengan AS yang selama ini menjadi “musuh” Teheran.

Hasil dan Pembahasan

1. Pola Kebijakan Hassan Rouhani

Presiden Rouhani memenangkan kursi kepresidenan Iran pada tahun 2013. Terpilihnya Rouhani tidak terlepas dari janjinya untuk membawa ukuran rasionalitas dan pragmatisme Iran ke pendekatan asing yang tidak efisien. Tidak seperti wacana revolusioner Ahmadinejad dan praktek konfrontatif dalam kebijakan luar negeri, pemerintahan Rouhani telah berjanji untuk melakukan desekuritisasi dan normalisasi hubungan luar negeri. Kemudian memperbaiki kondisi ekonomi yang memburuk. Tidak hanya itu, ia ingin mengakhiri sengketa nuklir lama dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga (Golmohammadi, 2019, p. 95).

Sekilas, visi yang diusung oleh Rouhani memang nampaknya ingin memulihkan beberapa sektor yang selama ini menjadi masalah bagi Iran. Selama ini, Iran “tersandera” oleh AS dan Barat dengan sanksinya. Desekuritisasi dan normalisasi hubungan luar negeri Iran merupakan langkah yang rasional. Karena menjalin hubungan baik dengan negara lain tentu sangat penting. Sebab, hal itu dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ingin direalisasikan oleh Iran.

Tidak seperti visi liberal-pragmatis Mohammad Khatami atau sikap ideologis-populis Mahmoud Ahmadinejad, Hassan Rouhani bertekad mengejar visi pragmatis sentris dalam kebijakan luar negeri Iran. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang, kebijakan luar negeri Iran tidak secara eksklusif dibentuk dalam konteks wacana dan ideologi Islam, berfluktuasi antara idealisme revolusioner dan realisme pragmatis. Pragmatisme selalu menjadi bagian integral dari arah luar negeri Iran, dan dapat dilacak dalam isu-isu kebijakan luar negeri yang hangat diperdebatkan seperti pengurangan hubungan ketegangan dengan AS atau dukungannya terhadap pasukan tertentu di Levant, yang keduanya tidak memiliki hubungan ideologis dengan Iran (Golmohammadi, 2019, p. 98).

Mengenai peran pemimpin tertinggi dalam kebijakan luar negeri Iran berarti bahwa meskipun ada perubahan sikap pemerintah di bawah pemerintahan Rouhani, ada tingkat kesinambungan yang cukup besar dalam kebijakan luar negeri Teheran. Memang, sejak Revolusi Islam 1979, tujuan utama kebijakan luar negeri Iran adalah untuk mengamankan kedaulatan dan kemerdekaan nasionalnya, sementara pada saat yang sama, menjaga keamanan tatanan politik Islam pasca 1979. Dengan demikian, berikut ini telah menjadi tujuan utama dari kebijakan luar negeri Iran (Yazdani, 2019, p. 474):

1. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan nasional negara
2. Keamanan perbatasan Iran
3. Melindungi pembentukan politik dan sistem pemerintahan negara
4. Memelihara kepentingan nasional Iran
5. Pengamanan kepentingan Dunia Islam

Melihat tujuan Rouhani untuk membangun relasi yang yang di beberapa sisi, pendekatan ini menawarkan suatu kebaruan. Rouhani ingin menyelesaikan kondisi ekonomi yang lebih baik dengan melakukan normalisasi hubungan. Kemudian ia juga ingin mengakhiri masalah nuklir yang menjadi aspek sekuritisasi yang penting dijadikan sebagai prioritas. Gaya Rouhani memang terbilang berbeda dengan pendahulunya. Ia terlihat lebih modern dan terbuka dalam memandang sesuatu untuk kemudian mengambil kebijakan.

2. Kebijakan Luar Negeri Rouhani dan Amerika Serikat

Hassan Rouhani bukan orang baru dalam dunia perpolitikan Iran. Ia adalah orang dalam rezim. Rouhani terlibat dalam gerakan anti-Syah menjelang revolusi 1979. Kemudian Ia bertugas di Dewan Pertahanan Tertinggi selama perang Iran-Irak. Selain itu, Rouhani juga Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan telah lama menjadi anggota Dewan Kemanfaatan, sebuah badan kunci yang memberi nasihat kepada Pemimpin Tertinggi. Rouhani tidak tertarik untuk mengakhiri atau bahkan mereformasi sistem pemerintahan Islam Iran, bahkan jika beberapa reformis mendukung pemilihannya sebagai presiden. Apa yang diuntungkan Rouhani, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa dia bukan pendahulunya (Shanahan, 2015, p. 6).

Pendekatan pragmatis pemerintahan Rouhani dikaitkan dengan basis sosial pemerintahannya. Dari sudut pandang ekonomi, pemerintahan Rouhani kurang lebih didasarkan pada ekonomi pasar. Pemerintahan Rouhani memiliki hubungan dekat dengan elit bisnis dan pedagang Iran. Sebagai konsekuensinya, dapat dikatakan bahwa dia memiliki pendukung keuangan yang lebih kuat daripada pemerintahan sebelumnya. Memang, banyak perbaikan dalam situasi ekonomi Iran, seperti stabilisasi mata uang, pengurangan inflasi, dan pemulihan sebagian kepercayaan bisnis selama periode kepresidenan Rouhani (Yazdani, 2019, p. 475).

Perkembangan politik domestik Iran mempengaruhi prospek Presiden AS Barrack Obama untuk mencapai melaksanakan perjanjian nuklir karena pemilihan presiden telah mengubah lanskap politik di Iran. Kemenangan kaum moderat adalah pergeseran dari sistem politik didominasi oleh garis keras dan konservatif. Jadi, pemilihan Hassan Rouhani pada Juni 2013 memberi Obama motivasi untuk merevisi kebijakan AS secara keseluruhan terhadap Iran. Menariknya, sikap Rouhani berkonsentrasi pada perubahan sikap Iran di Barat dengan memprioritaskan masalah internasional dengan meningkatkan hubungan negara dengan Barat dan meningkatkan ekonomi Iran melalui pencabutan sanksi perdagangan yang dikenakan pada Iran secara teratur (Albarasneh & Khatib, 2019, p. 10).

Terpilihnya Hassan Rouhani memberikan warna baru terhadap konstelasi politik Iran. Figur moderat Iran tersebut mampu mengubah pola komunikasi AS-Iran yang semula sarat akan ketegangan menjadi lebih halus. Percakapannya dengan presiden Obama melalui sambungan telepon menjadi peristiwa bersejarah bagi hubungan kedua negara tersebut. Terlebih pasca revolusi Iran 1979 hubungan

antara AS-Iran selalu diwarnai dengan konflik yang tak berujung. Rouhani sendiri berjanji untuk memberikan masa depan ekonomi yang lebih baik bagi Iran. Untuk merealisasikan janjinya tersebut, Rouhani terlebih dahulu harus membebaskan Iran dari isolasi regional maupun internasional. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan program nuklir Iran.

3. Kebijakan Nuklir: Babak Baru Hubungan Iran-AS

Tiga puluh lima tahun lebih setelah Revolusi dan pemutusan hubungan berikutnya, presiden Iran dan Amerika melakukan percakapan telepon penting, dan para menteri luar negeri kedua negara telah bertemu beberapa kali dalam bentuk pembicaraan bilateral dan multilateral. Optimisme yang kini muncul bukan hanya karena pencabutan sanksi secara bertahap, tetapi juga hasil pemilu 2013 yang membawa kembali kaum pragmatis dan reformis ke tampuk kekuasaan, yang telah menunjukkan keinginan mereka untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Barat (Izadpanahi, 2015, p. 161).

Rouhani memahami bahwa menyelesaikan masalah nuklir sangat penting untuk memperkuat ekonomi Iran dan mengakhiri isolasi internasionalnya. Bukan berarti Presiden dan pemerintahannya tidak mendukung program tersebut. Tetapi mereka percaya bahwa masalah tersebut telah digunakan oleh lawan-lawan Iran untuk menekan, memberi sanksi, dan mengisolasi Iran. Mereka pikir mereka dapat mencapai kompromi yang bisa diterapkan yang akan menjaga hak nuklir Iran sekaligus menghilangkannya sebagai hambatan bagi keterlibatan regional dan internasional Iran. Memang, ironi mungkin tidak hilang pada beberapa tetangga Iran. Kesepakatan yang berhasil mungkin akan mengurangi ancaman nuklir dari Iran. Tetapi jika Teheran mampu mencapai sanksi substantif dan diperpanjang keringanan sebagai konsekuensi dari negosiasi nuklir, kemungkinan hasilnya adalah Iran yang berpotensi lebih kuat dan lebih berpengaruh daripada yang ada saat ini dan yang dianggap dengan kecurigaan oleh negara-negara regional daripada saat ini (Shanahan, 2015, p. 8).

Di front nuklir, dinamika dari titik ini terungkap dan seterusnya tergantung pada banyak aktor dan pilihan strategis mereka yang memungkinkan untuk berbagai skenario. Adapun skenario tersebut mulai dari upaya oleh Iran dan penandatanganan kesepakatan nuklir atau *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang tersisa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir bersama, mengisolasi Amerika Serikat, dan merusak sanksi yang baru melalui pembaruan Iran dengan pengayaan uranium “sipil”, hingga Iran meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir atau *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) untuk mencari kekebalan dari serangan nuklir. Sisi ekonomi juga akan memainkan peran sentral dalam permainan ini, sebagai keuangan, sosial, dan politik, stabilitas Iran juga tergantung pada reaksi Eropa serta perusahaan internasional dan pasar dunia (Orion & Yadlin, 2018, p. 3).

Amerika Serikat tampak memahami kemampuan mereka untuk mempengaruhi dinamika politik Timur Tengah dengan cara yang konstruktif begitu terbatas. Di sisi lain, Obama juga memahami bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran tentang masalah nuklir semakin meningkat. Hal ini turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan di kawasan Arab yang sarat konflik (Harrison, 2020, p. 17). Menyadari polemik nuklir semakin panas, Obama berupaya mengakhiri ketegangan tersebut dengan mengikuti *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dalam upaya membatasi program nuklir Iran. Kesepakatan nuklir yang terjadi pada tahun 2015 tersebut merupakan upaya AS untuk menguji motivasi dari doktrin strategis pertahanan Iran ke depan.

Pada tanggal 2 April 2015, setelah negosiasi maraton menyebar selama beberapa bulan, Iran dan P5+1 sepakat untuk meletakkan kerangka kesepakatan nuklir komprehensif bersejarah pada tanggal 30 Juni 2015. Kerangka kerja yang disepakati diumumkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif dalam pernyataan bersama menetapkan (Hussain, 2015, p. 43):

1. Iran akan mengurangi jumlah sentrifugal dari 19.000 menjadi 6.104

2. Iran akan mengurangi persediaan uranium dari 10 ton menjadi 300 kg
3. Tidak ada pengayaan yang akan dilakukan di fasilitas Fordow selama 15 tahun
4. Iran akan mendesain ulang reaktor yang hampir dibangun di Arak
5. Sanksi AS dan Uni Eropa akan ditangguhkan jika Iran tetap pada komitmennya
6. Sanksi AS terhadap Iran terkait dengan pelanggaran keamanan dan hak asasi manusia akan tetap dipersilahkan

Pada 14 Juli 2015, P5+1, Uni Eropa, dan Iran mengumumkan JCPOA. Hal ini disampaikan langsung oleh Barack Obama dalam konferensi pers-nya di Gedung Putih. Kesepakatan JCPOA juga akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan memastikan bahwa program nuklir Iran akan eksklusif damai. JCPOA mengatur pencabutan sanksi terkait nuklir terhadap Iran. Selain itu, JCPOA berguna untuk penyelesaian masalah Iran atas langkah-langkah terkait pengembangan nuklir, sebagaimana diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) (Authenticated U.S. Government Information GPO, 2016).



Gambar 1. Pertemuan antara Barack Obama dan Hassan Rouhani

Sumber: <http://www.peaceanarchy.com/2013/12/desekuritisasi-iran-dan-masa-depan.html>

Tercapainya kesepakatan nuklir bersama ini menjadi capaian baru yang dilakukan oleh Obama. Melalui kesepakatan tersebut, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran menjadi lebih cair daripada sebelumnya. AS tidak perlu menekan Iran lebih jauh terkait pengayaan uranium dan pembuatan nuklir mereka karena masing-masing pihak sudah menandatangani perjanjian tersebut. Obama memahami bahwa memilih opsi “*hard power*” melalui kontak senjata bukanlah suatu pilihan yang tepat, ia memilih opsi “*soft power*” dengan mengutamakan diplomasi untuk memperoleh kepentingan nasional Amerika Serikat, khususnya dalam mengontrol program nuklir Iran.

Kerangka kerja yang komprehensif dipuji oleh Obama yang menyebutnya sebagai kesepakatan bagus yang akan mengatasi kekhawatiran tentang ambisi nuklir Iran. AS telah mencapai kesepakatan bersejarah dengan Iran. Namun, Presiden Obama menelepon sekutu regionalnya Raja Salman dari KSA dan mengundangnya ke Camp David untuk membahas Iran dan gejolak di kawasan itu. Dia juga menelepon Benjamin Netanyahu untuk meyakinkannya bahwa kesepakatan itu telah secara signifikan mengurangi jalur Iran menuju bom. Menariknya, reaksi Presiden Obama terhadap kerangka kerja komprehensif disiarkan langsung di TV Iran, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Iran, dan yang mengejutkan, ada kegembiraan di Iran dan orang-orang keluar (Hussain, 2015, p. 43).

Negosiasi nuklir dan JCPOA berikutnya mewakili peningkatan penting dalam hubungan Washington-Teheran di mana kedua belah pihak telah melakukan negosiasi yang mendalam dan

berkepanjangan untuk pertama kalinya sejak 1979. Bahkan setelah negosiasi berhasil, masih ada sedikit prospek hubungan normalisasi antara kedua negara dengan cepat mengingat adanya historis ketidakpercayaan yang mendalam (Yazdani, 2019, p. 480).

Sentralitas pemimpin tertinggi dalam masalah kebijakan luar negeri Iran merupakan bagian dari perubahan pemerintahan di Teheran yang dapat memberikan tingkat kesinambungan yang signifikan dalam kebijakan Iran. Namun, ada beberapa perbedaan utama antara Rouhani dan pendahulunya. Rouhani percaya bahwa kunci untuk memperluas peran Iran di kawasan itu adalah untuk memperkuat ekonominya. Bagi Rouhani, memperbaiki situasi ekonomi Iran adalah tidak hanya penting untuk mempertahankan dukungan domestik untuk pemerintahannya, tetapi juga kunci untuk meningkatkan pengaruh Iran di kawasan dan global. Memang, kebijakan Rouhani menunjukkan banyak peningkatan situasi ekonomi Iran seperti stabilisasi mata uang dan pengurangan inflasi (Shanahan, 2015, p. 3).

Sanksi ekonomi yang dimulai pada tahun 1979, menjadi sangat efektif selama pemerintahan Obama karena diadopsi oleh banyak negara lain termasuk Uni Eropa. Pengenaan sanksi menyebabkan Iran menandatangani perjanjian sementara (Rencana Aksi Bersama) pada bulan November 2013 yang membekukan bagian dari program nuklirnya dengan imbalan bantuan terbatas dari sanksi. Perjanjian sementara dirancang sebagai pendahulu dari perjanjian komprehensif yang seharusnya mengakhiri potensi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan penghapusan semua sanksi. Prospek untuk menyimpulkan kesepakatan yang komprehensif cerah dengan keberhasilan kesimpulan dari kerangka kerja untuk kesepakatan pada April 2015. Kerangka tersebut membatasi (tetapi tidak menghilangkan) kemampuan nuklir Iran selama 10 sampai 15 tahun, dengan imbalan diakhirinya sanksi. Perjanjian tersebut memberikan janji untuk menunda langkah Iran menuju pengembangan senjata nuklir, tetapi dengan mengorbankan legitimasi statusnya sebagai negara ambang batas nuklir (David, 2015, p. 18).

Kebijakan Obama terhadap Iran mengikuti jalur realis karena mengeluarkan cara yang terbatas untuk tujuan yang terbatas. Obama tidak ingin Iran mendapatkan senjata nuklir, tetapi dia tidak mau membayar mahal untuk menghentikan mereka melakukannya. Kebijakan Amerika berusaha untuk mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir karena Washington mengakui bahwa Iran bersenjata nuklir akan mengancam Israel, sekutu Amerika lainnya, dan dapat memacu proliferasi di tempat yang lain. Melawan ancaman ini membenarkan upaya untuk menerapkan sanksi dan mengejar diplomasi untuk mencegah Iran bersenjata nuklir (David, 2015, p. 19).

Obama tidak hanya secara virtual menghilangkan kemungkinan serangan Amerika, dia juga bekerja untuk memastikan bahwa Israel juga tidak akan menyerang Iran. Kebijakan Amerika tentang "tidak ada senjata nuklir Iran" jelas-jelas kurang menuntut daripada kebijakan Israel tentang "tidak ada kemampuan senjata nuklir Iran." Dengan menaikkan ambang batas untuk serangan Amerika, Obama memberi isyarat kepada Israel bahwa mereka juga harus menunda serangan. Iran sampai senjata yang sebenarnya diproduksi. Pesan ini telah diperkuat oleh hampir setiap pejabat senior dari pemerintahan Obama. Ketakutannya adalah bahwa serangan Israel, bahkan yang dilakukan tanpa dukungan Amerika, akan tetap melibatkan Amerika Serikat, merugikan kepentingan Amerika. Pesannya jelas. Terutama karena diplomasi tampaknya membuahkan hasil, Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran dan mengharapkan Israel untuk mengikutinya (David, 2015, p. 19).

Sikap Iran adalah bahwa ia tidak akan melepaskan haknya untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai seperti yang dijanjikan oleh NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*). Hak ini, yang sering digunakan dan di depan umum oleh negarawan Iran untuk menentukan harapan mereka dari P5+1, menginformasikan pendekatan Iran terhadap pembicaraan dan oleh karena itu tidak dapat dinegosiasikan. Dalam terang ini, oleh karena itu, kapasitas yang lebih rendah untuk pengayaan sedang dicari. Telah diperdebatkan bahwa ini akan menjadi "win-win" untuk Iran dan P5+1. Pertama, masih akan

memungkinkan Iran untuk memenuhi "kebutuhan praktis" seperti yang diakui dalam JCPOA dari program nuklir sipilnya, seperti bahan bakar untuk Reaktor Penelitian Teheran (TRR), Bushehr, dan empat reaktor penelitian air ringan yang dimiliki Iran. Kedua, ini diharapkan untuk memperpanjang "break-out" Iran jika memutuskan untuk keluar dari perjanjian, dan memperkaya uranium ke tingkat senjata untuk bom nuklir (Neog, 2015, p. 161).

Kebijakan yang diambil oleh Hassan Rouhani ini terbilang cukup berani. Bagaimana tidak, Ia menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh pendahulunya. Tentu saja tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas politik internasional dan domestik Iran dengan memperbaiki perekonomian negara. Setelah itu, ia mengambil langkah sekritisasi dengan mengikuti JCPOA. Tentu saja hal ini menjadi warna baru dalam jejak politik Iran. Namun perlu dicatat bahwa apabila kesepakatan itu gagal, tentu saja akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Hassan Rouhani terhadap Amerika Serikat terfokus pada dua aspek, yaitu ekonomi dan nuklir. Untuk menjaga stabilitas negara, Rouhani melakukan gebrakan dengan melakukan normalisasi hubungan dan pendekatan kepada negara-negara tetangga. Kemudian untuk menjaga aspek keamanan, Rouhani membuka komunikasi dengan Presiden AS yaitu Barrack Obama. Komunikasi yang terjalin tersebut menghasilkan kesepakatan baru tentang nuklir yaitu JCPOA. Pendekatan yang dilakukan oleh Rouhani ini membuat Obama menimbang ulang terkait sikap AS terhadap Iran. Obama cenderung melepaskan sikap *hard power* menuju *soft power*. Kesepakatan tersebut sekaligus mencairkan hubungan Iran-AS. Hal ini terlihat dari lepasnya intervensi ekonomi AS terhadap Iran yang memungkinkan Iran untuk menjaga stabilitas baik dalam dan luar negeri.

Daftar Pustaka

- Ahmed, J. (2020). The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations- An Analyses. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), 787-792.
- Albarasneh, A. S., & Khatib, D. K. (2019). The US policy of containing Iran – from Obama to Trump 2009–2018. *Global Affairs*, 1-19.
- Authenticated U.S. Government Information GPO*. (2016, January 16). Retrieved from Administration of Barack Obama.
- David, S. R. (2015). Obama's Realist Policies. *Begin-Sadat Center for Strategic Studies*, 14-33.
- Golmohammadi, V. (2019). The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Prospects for Change and Continuity. *All Azimuth*, 8(1), 93-102.
- Harrison, R. (2020). The U.S.-Iran Showdown: Clashing Strategic Universes Amid a Changing Region. *Al-Jazeera Centre for Studies*(16), 1-22.
- Hussain, N. (2015). US-Iran Relations: Issues, Challenges and Prospects. *Policy Perspective*, 12(2), 29-47. doi:10.13169/polipers.12.2.0029

Izadpanahi, M. (2015). Rouhani and Iran's Foreign Policy: Charting the Change. In I. o. Studies, *Iran Nuclear Deal* (pp. 161-166). Institute of Peace and Conflict Studies.

Moehnilabib, & dkk. (1997). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang.

Neog, R. (2015). Iran-P5+1 Nuclear Negotiations: What Is Holding It Up? In I. o. Studies, *Iran Nuclear Deal* (pp. 161-166). Institute of Peace and Conflict Studies.

Orion, A., & Yadlin, A. (2018). Iran in the Nuclear Realm and Iran in Syria: A New State of Play. *INSS Insight (Jurnal Institute for National Security Studies)*, 1055(14), 1-5.

Salehzadeh, A. (2013). Iran's Domestic And Foreign Policies. *National Defence University*, 4(49), 1-37.

Shanahan, R. (2015). Iranian Foreign Policy under Rouhani. *Lowy Institute for International Policy*, 1-11.

Yazdani, E. (2019). Iranian Foreign Policy During Rouhani Presidency: Perspective on Change and Continuity. *International Relations and Diplomacy*, 7(10), 472-484. doi:10.17265/2328-2134/2019.10.003